

Evaluasi perlakuan akuntansi di badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah Kota Tomohon

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 2 Nomor 2 2024
Hal. 473-486
DOI: 10.58784/rapi.236

Agnes Michelle Jocom
Corresponding author:
agnesjocom064@student.unsrat.ac.id
Sam Ratulangi University
Indonesia

Novi Swandari Budiarmo
Sam Ratulangi University
Indonesia

Dhullo Afandi
Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 2 November 2024
Revised 9 November 2024
Accepted 13 November 2024
Published 16 November 2024

ABSTRACT

Government Regulation Number 71 of 2010 sets out the government accounting standards that must be applied in preparing and presenting government financial reports. This study will evaluate the suitability of the accounting treatment related to the presentation and disclosure of financial statements based on government accounting standards in Government Regulation Number 71 of 2010 at the Tomohon City Regional Revenue and Financial Management Agency. This study employs a descriptive qualitative approach, utilising both interview and documentation data collection techniques. The findings indicate that the majority of financial statements presented and disclosed have been prepared in accordance with Government Regulation Number 71 of 2024. However, there are still discrepancies in the disclosure of balance sheet details.

Keywords: report presentation; report disclosure; financial reports; balance sheet
JEL Classification: H71; H72

©2024 Agnes Michelle Jocom, Novi Swandari Budiarmo, Dhullo Afandi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Akuntansi sektor publik mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam kurun waktu yang relatif singkat. Saat ini, praktik akuntansi di berbagai lembaga publik, termasuk lembaga pemerintah, semakin menarik perhatian dibanding sebelumnya maka itu, tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas publik semakin meningkat. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, pertanggungjawaban atas wewenang yang diberikan adalah melalui penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan ini bertujuan untuk membangun pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Salah satu upaya untuk memberikan keyakinan yang memadai atas kewajaran penyajian laporan keuangan adalah kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai SAP, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai SAP yaitu dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

Laporan keuangan harus memberikan informasi yang cukup, wajar dan lengkap mengenai hasil dari suatu entitas.

Pengungkapan dalam laporan keuangan diperlukan agar laporan keuangan tidak menyesatkan. Pengungkapan yang lengkap harus diimbangi dengan penyajian informasi yang relevan. Penyajian laporan keuangan sangat penting karena dapat meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah dalam rangka menyediakan informasi keuangan yang terbuka kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Suliadi et al. 2024).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Entitas Pelaporan yang merupakan konsolidator laporan keuangan Pemerintah Kota Tomohon juga memenuhi tanggungjawabnya sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun laporan keuangan sendiri untuk digabungkan dalam entitas pelaporan. Pemerintah Kota Tomohon telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebelas kali berturut-turut menurut laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahun anggaran 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Proses konsolidasi laporan keuangan Pemerintah Kota Tomohon bukan hanya dibebankan kepada Pemerintah Daerah melainkan juga menjadi tanggung jawab dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada tetapi menurut observasi awal tidak semua laporan keuangan SKPD diperiksa oleh BPK melainkan hanya mengambil sekitar 10 sampel dari 44 SKPD yang ada di Kota Tomohon. Hal itu jelas menjadi masalah disebabkan masih banyak laporan keuangan SKPD yang tidak diperiksa kesesuaiannya dengan standar yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) yang terletak di Kota Tomohon. Penelitian ini didasarkan pertimbangan tugas BPKPD yaitu menyelenggarakan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan

pendapatan daerah untuk menilai apakah laporan keuangan yang dihasilkan BPKPD sebagai suatu entitas akuntansi sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

2. Tinjauan pustaka

- *Akuntansi*. Menurut Kieso et al. (2020). Akuntansi adalah bahasa universal bisnis. Akuntansi merupakan rangkaian proses yang meliputi kegiatan-kegiatan pengidentifikasian, pencatatan, pengelompokan, peringkasan, pelaporan, penganalisaan, dan penafsiran tentang informasi keuangan yang terjadi pada suatu unit sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Tjanrakirana et al., 2021).
- *Akuntansi pemerintah*. Akuntansi pemerintah, baik berbentuk lembaga atau kementerian, badan, organisasi nirlaba dan lain-lain, merupakan cabang Ilmu Akuntansi yang menangani masalah akuntansi, administrasi dan pelaporan keuangan publik untuk pemerintah pusat dan daerah. Menurut Mahmudi (2021). Akuntansi pemerintah adalah sistem akuntansi yang diterapkan pada organisasi pemerintah untuk menghasilkan informasi keuangan pemerintah yang diperlukan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.
- *Standar Akuntansi Pemerintah*. Standar akuntansi adalah metode seragam yang digunakan untuk menyajikan informasi, sehingga laporan keuangan dari berbagai unit/entitas dapat dibandingkan dengan mudah baik dari konsep, standar, prosedur, metode, konvensi, kebiasaan dan praktik yang dipilih dapat diterima oleh pihak lain. Berdasarkan hal

tersebut, terdapat peraturan yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 yang menjelaskan tentang SAP yang berisi prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

- *Laporan keuangan.* Laporan keuangan adalah ringkasan prosedur yang mendokumentasikan transaksi keuangan yang terjadi selama periode pelaporan (Bahri, 2020). Hal itu merupakan hasil atau kinerja dari pihak pengelola dalam usaha pertanggungjawaban penggunaan sumber daya dan sumber dana yang dipercayakan kepada pihak pengelola. Menurut PP 71 Tahun 2010, laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
- *Laporan Realisasi Anggaran (LRA).* Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos pendapatan-LRA, belanja. Transfer, surplus/defisit-LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).
- *Neraca.* Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang

dicakup oleh neraca terdiri atas aset, kewajiban, dan ekuitas. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan hasil selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Neraca sekurang-kurangnya mencakup pos-pos kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas

- *Laporan Operasional (LO).* Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Laporan Operasional sekurang-kurangnya mencakup pos-pos pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO.
- *Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).* Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- *Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).* Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain

yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam SAP serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

3. Metode riset

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna (Sugiyono, 2019). Jenis data penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 pada BPKPD Kota Tomohon. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh langsung dari responden individu bidang yang terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Penyajian dan pengungkapan Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon

Laporan Realisasi Anggaran BPKPD disajikan bukan hanya sekali dalam setahun melainkan disajikan setiap bulan yaitu 12 (dua belas) kali, setiap triwulan yaitu 4 (empat) kali, tiap semester yaitu 2 (dua) kali dan tahunan yaitu sekali dalam setahun. Penyajian dan pengungkapan pendapatan dalam LRA BPKPD diklasifikasikan berdasarkan sumber pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Penyajian dan pengungkapan belanja dalam LRA BPKPD diklasifikasikan berdasarkan Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga.

Penyajian dan pengungkapan Neraca Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon

Neraca per 31 Desember 2023 pada BPKPD Kota Tomohon terdiri dari Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Penyajian dan pengungkapan aset pada Neraca diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya. Penyajian dan pengungkapan Kewajiban pada Neraca diklasifikasikan menjadi Kewajiban Jangka Panjang dan Kewajiban Jangka Pendek. Penyajian dan pengungkapan Ekuitas pada Neraca disajikan secara Total Ekuitas yang merupakan kekayaan bersih dari selisih antara Aset dengan Kewajiban.

Penyajian dan pengungkapan Laporan Operasional Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon

Laporan Operasional Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon hanya disajikan sekali dalam setahun. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan dalam Laporan Operasional diklasifikasikan berdasarkan sumber pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO. Penyajian dan pengungkapan Beban dalam Laporan Operasional diklasifikasikan berdasarkan Belanja Daerah yaitu Beban Operasi.

Penyajian dan pengungkapan Laporan Perubahan Ekuitas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon

Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit, Koreksi, Kewajiban untuk dikonsolidasikan dan Ekuitas Akhir.

Ekuitas Awal adalah Ekuitas Akhir dari tahun sebelum Laporan Perubahan Ekuitas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Catatan atas Laporan Keuangan yang telah dibuat oleh Badan Pengelolaan Keuangan sehubungan dengan Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal
2. Surplus/Defisit-LO
3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
4. Ekuitas Akhir

Penyajian dan pengungkapan Catatan atas Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon

- a. Penyajian Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi : Domisili dan Bentuk Hukum, Sifat Operasi Entitas dan Kegiatan Pokok dan Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional
- b. Penyajian Informasi tentang Kebijakan Fiskal/keuangan dan Ekonomi Makro: Kebijakan keuangan yang didalamnya

terdapat Kebijakan Umum pada Aspek Belanja Daerah dan Indikator pencapaian target kinerja APBD

- c. Penyajian Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan selama Tahun Pelaporan

Pembahasan

Evaluasi penyajian dan Pengungkapan Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon

Pembahasan yang dilakukan yakni evaluasi terkait hal-hal yang berhubungan dengan penyajian dan pengungkapan atas setiap Laporan Keuangan yang dibuat oleh SKPD BPKPD Kota Tomohon kemudian dibandingkan dengan SAP dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan didukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara. Proses perbandingan ini akan dilakukan dengan cara membandingkan LRA yang disajikan menyangkut format, isi dan seterusnya kemudian dibandingkan dengan SAP demikian juga persyaratan minimal CaLK yang harus dibuat. Berikut adalah beberapa komponen yang akan dievaluasi berdasarkan SAP dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010:

Tabel 1. Evaluasi Laporan Realisasi Anggaran

Unsur	BPKPD	PP No 71 Tahun 2012	Ket
Format Laporan	Laporan Realisasi Anggaran menyajikan: 1. Uraian 2. Kolom Anggaran 3. Realisasi 4. Presentasi 5. Realisasi tahun sebelumnya	Format Laporan Realisasi Anggaran SKPD menggambarkan menyajikan: 1. Uraian 2. Kolom tahun anggaran 3. Realisasi tahun anggaran 4. Presentasi 5. Realisasi tahun sebelumnya	Sesuai
Penyajian informasi mengenai pos-pos laporan	Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai pos-pos berikut: 1. Pendaptan-LRA 2. Belanja 3. Tranfer 4. Surplus/Defisit 5. Penerimaan Pembiayaan 6. Pengeluaran Pembiayan 7. Pembiayaan Neto 8. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)	Laporan Realisasi Anggaran menyajikan pos-pos berikut: 1. Pendapatan-LRA 2. Belanja 3. Tranfer 4. Surplus/defisit 5. Penerimaan Pembiayaan 6. Pengeluaran Pembiayaan 7. Pembiayaan Neto 8. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)	Sesuai
Periode Pelaporan	Laporan Realisasi Anggaran disajikan setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan	Laporan Realisasi Anggaran disajikan minimal sekali setahun	Sesuai
Penyajian informasi mengenai nama entitas, cakupan entitas, mata uang dan satuan angka	Laporan Realisasi Anggaran disajikan secara jelas dihalaman depan mengenai: 1. Nama entitas pelaporan dan sarana identifikasi lainnya 2. Cakupan entitas pelaporan 3. Mata uang pelaporan 4. Satuan angka yang digunakan.	Laporan Realisasi Anggaran menyajikan secara jelas dan diulang di setiap halaman pelaporan jika harus mengenai: 1. Nama entitas pelaporan dan sarana indentifikasi lainnya 2. Cakupan entitas pelaporan 3. Mata uang pelaporan 4. Satuan angka yang digunakan	Sesuai
Penyajian pendapatan	Laporan Realisasi Anggaran menyajikan Pendapatan menurut jenisnya yaitu: 1. Pendapatan Asli Daerah 2. Pendapatan Tranfer 3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Laporan Realisasi Anggaran menyajikan Pendapatan berdasarkan klasifikasi menurut jenis pendapatan yaitu: 1. Pendapatan Asli Daerah 2. Pendapatan Tranfer 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Sesuai
Penyajian Belanja	Laporan Realisasi Anggaran menyajikan Belanja menurut jenisnya yaitu: 1. Belanja Operasi 2. Belanja Modal 3. Belanja Tidak Terduga	Laporan Realisasi Anggaran menyajikan Belanja berdasarkan klasifikasi menurut jenis belanja yaitu: 1. Belanja Operasi 2. Belanja Modal 3. Belanja Tidak Terduga	Sesuai

Penyajian Pembiayaan	Laporan Realisasi Anggaran menyajikan berdasarkan jenis pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan	Anggaran pembiayaan penerimaan dan pengeluaran	Laporan Realisasi Anggaran menyajikan berdasarkan jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan	Sesuai
Pengungkapan dalam CaLK	Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan: 1. Anggaran 2. Realisasi 3. Presentase pencapaian 4. Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi 5. Perbandingan dengan periode yang lalu 6. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu 7. Rincian lebih lanjut pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan 8. Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi 9. Rincian lebih lanjut pembiayaan 10. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan	Anggaran	Catatan atas Laporan Keuangan untuk Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan: 1. Anggaran 2. Realisasi 3. Presentase pencapaian 4. Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi 5. Perbandingan dengan periode yang lalu 6. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu 7. Rincian lebih lanjut pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan 8. Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi 9. Rincian lebih lanjut pembiayaan 10. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan	Sesuai

Sumber: Data olahan, 2024

Berdasarkan tabel 1, BPKPD Kota Tomohon telah menyajikan dan mengungkapkan setiap rincian pos pada LRA sesuai dengan SAP yang dimana hal tersebut telah sejalan dengan penelitian Ahmad (2023) dan Larasati et al. (2023)

Evaluasi penyajian dan pengungkapan Neraca Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon

Pembahasan yang dilakukan yakni evaluasi terkait hal-hal yang berhubungan dengan penyajian dan pengungkapan atas setiap Laporan Keuangan yang dibuat oleh SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon kemudian dibandingkan dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan didukung dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Proses perbandingan ini akan dilakukan dengan cara membandingkan Neraca yang disajikan menyangkut format, isi dan seterusnya kemudian dibandingkan dengan SAP demikian juga persyaratan minimal CaLK yang harus dibuat. Berikut adalah beberapa komponen yang akan dievaluasi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010:

Tabel 2. Evaluasi Neraca

Unsur	BPKPD	PP No 71 Tahun 2010	Ket
Format Laporan	Neraca menyajikan uraian, posisi keuangan dan perbandingan dengan tahun sebelumnya	Format Neraca SKPD harus menggambarkan uraian menyajikan uraian serta posisi keuangan entitas dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya	Sesuai
Penyajian informasi mengenai pos-pos laporan	Neraca menyajikan informasi mengenai pos-pos berikut: 1. Kas dan Setara Kas 2. Investasi Jangka Pendek 3. Piutang Pajak dan Bukan Pajak 4. Persediaan 5. Investasi Jangka Panjang 6. Aset Tetap 7. Kewajiban Jangka Pendek 8. Kewajiban Jangka Panjang 9. Ekuitas	Neraca menyajikan pos-pos berikut: 1. Kas dan Setara Kas 2. Investasi Jangka Pendek 3. Piutang Pajak dan Bukan Pajak 4. Persediaan 5. Investasi Jangka Panjang 6. Aset Tetap 7. Kewajiban Jangka Pendek 8. Kewajiban Jangka Panjang 9. Ekuitas	Sesuai
Penyajian Aset	Neraca menyajikan Aset berdasarkan klasifikasinya yaitu: 1. Aset Lancar 2. Aset Non Lancar	Neraca menyajikan Aset berdasarkan Klasifikasi: 1. Aset Lancar 2. Aset Non Lancar	Sesuai
Penyajian Kewajiban	Neraca menyajikan berdasarkan klasifikasi: 1. Kewajiban Jangka Pendek 2. Kewajiban Jangka panjang	Neraca menyajikan Kewajiban berdasarkan klasifikasi: 1. Kewajiban jangka Pendek 2. Kewajiban Jangka Panjang	Sesuai
Penyajian Ekuitas	Neraca Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon menyajikan Ekuitas	Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan	Sesuai
Pengungkapan dalam CaLK	Neraca mengungkapkan: 1. Perbandingan dengan periode lalu 2. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu 3. Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek dan ekuitas 4. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan	Catatan atas Laporan Keuangan untuk Neraca mengungkapkan: 1. Perbandingan dengan periode lalu 2. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu 3. Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang dan ekuitas 4. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan	Belum Sesuai

Sumber: Data olahan, 2024

Berdasarkan tabel 2, BPKPD Kota Tomohon telah menyajikan setiap pos pada Neraca sesuai dengan SAP yang dimana hal tersebut telah sejalan dengan penelitian Irooth et al. (2023).

Evaluasi penyajian dan pengungkapan Laporan Operasional Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon

Pembahasan yang dilakukan yakni evaluasi terkait hal-hal yang berhubungan dengan penyajian dan pengungkapan atas setiap Laporan Keuangan yang dibuat oleh SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan

Pendapatan Daerah Kota Tomohon kemudian dibandingkan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Proses perbandingan ini akan dilakukan dengan cara membandingkan Laporan Operasional yang disajikan menyangkut format, isi dan seterusnya kemudian dibandingkan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan demikian juga persyaratan minimal CaLK yang harus dibuat. Berikut adalah beberapa komponen yang akan dievaluasi berdasarkan SAP dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010:

Tabel 3. Evaluasi Laporan Operasional

Unsur	BPKPD	PP No 71 Tahun 2010	Ket
Format Laporan	Laporan Operasional menyajikan: 1. Uraian 2. Saldo tahun anggaran dan saldo tahun sebelum 3. Kenaikan/penurunan dan persentasinya	Format Laporan Operasional SKPD harus menggambarkan: 1. Uraian 2. Saldo tahun anggaran dan saldo tahun sebelum 3. Kenaikan/penurunan dan persentasinya	Sesuai
Penyajian informasi mengenai pos-pos laporan	Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai pos-pos berikut: 1. Pendapatan-LO 2. Beban 3. Surplus/defisit dari Operasi 4. Kegiatan Non Operasional 5. Surplus/defisit Pos Luar Biasa 6. Pos Luar Biasa 7. Surplus/defisit-LO	Laporan Operasional menyajikan pos-pos berikut: 1. Pendapatan-LO 2. Beban 3. Surplus/defisit dari Operasi 4. Kegiatan Non Operasional 5. Surplus/defisit Pos Luar Biasa 6. Pos Luar biasa 7. Surplus/defisit-LO	Sesuai
Periode Pelaporan	disajikan setiap tahun	Laporan Operasional disajikan minimal sekali setahun	Sesuai
Penyajian informasi mengenai nama entitas, cakupan entitas, mata uang dan satuan angka	Laporan Operasional disajikan secara jelas di halaman depan dan 1. nama entitas pelaporan dan sarana identifikasi lainnya 2. Cakupan entitas pelaporan 3. Mata uang pelaporan 4. Satuan angka yang digunakan	Laporan Operasional menyajikan secara jelas dan diulang di setiap halaman pelaporan jika harus mengenai 1. Nama entitas pelaporan dan sarana identifikasi lainnya 2. Cakupan entitas pelaporan 3. Mata uang pelaporan 4. Satuan angka yang	Sesuai

Penyajian Pendapatan	Pada Laporan Operasional menyajikan Pendapatan menurut jenisnya yaitu: 1. Pendapatan Asli Daerah 2. Pendapatan Transfer 3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	digunakan Laporan Operasional menyajikan Pendapatan berdasarkan klasifikasi menurut jenis pendapatan yaitu: 1. Pendapatan Asli Daerah 2. Pendapatan Transfer 3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Sesuai
Penyajian Beban	Laporan Operasional menyajikan Beban menurut jenisnya yaitu: 1. Beban Pegawai 2. Beban Persediaan 3. Beban Jasa 4. Beban Pemeliharaan 5. Beban Perjalanan Dinas 6. Beban Bunga 7. Beban Hibah 8. Beban Penyisihan Piutang 9. Beban Penyusutan dan Amortisasi	Laporan Operasional menyajikan Beban Daerah berdasarkan klasifikasi Beban Operasi yaitu: 1. Beban Pegawai 2. Beban Persediaan 3. Beban Jasa 4. Beban Pemeliharaan 5. Beban Perjalanan Dinas 6. Beban Bunga 7. Beban Hibah 8. Beban Lain-lain	Sesuai
Pengungkapan dalam CaLK	Catatan atas Laporan Keuangan untuk Laporan Operasional mengungkapkan: 1. Perbandingan dengan periode lalu 2. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu 3. Rincian lebih lanjut pendapatan-LO menurut sumber pendapatan 4. Rincian lebih lanjut beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi 5. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan	Catatan atas Laporan Keuangan untuk Laporan Operasional mengungkapkan: 1. Perbandingan dengan periode lalu 2. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu 3. Rincian lebih lanjut pendapatan-LO menurut sumber pendapatan 4. Rincian lebih lanjut beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi 5. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan	Sesuai

Sumber: Data olahan, 2024

Berdasarkan tabel 3, BPKPD Kota Tomohon telah menyajikan dan mengungkapkan setiap rincian pos pada LO sesuai dengan SAP yang dimana hal tersebut telah sejalan dengan penelitian Bafagehi et al. (2023) dan Subekti et al. (2024)

Evaluasi penyajian dan pengungkapan Laporan Perubahan Ekuitas Badan

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon

Pembahasan yang dilakukan yakni evaluasi terkait hal-hal yang berhubungan dengan penyajian dan pengungkapan atas setiap Laporan Keuangan yang dibuat oleh SKPD BPKPD Kota Tomohon kemudian dibandingkan dengan SAP dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Proses perbandingan ini akan

dilakukan dengan cara membandingkan Laporan Perubahan Ekuitas yang disajikan menyangkut format, isi dan seterusnya kemudian dibandingkan dengan SAP demikian juga persyaratan minimal CaLK

yang harus dibuat. Berikut adalah beberapa komponen yang akan dievaluasi berdasarkan SAP dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010:

Tabel 4. Evaluasi Laporan Perubahan Ekuitas

Unsur	BPKPD	PP No 71 Tahun 2010	Ket
Format Laporan	Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan: 1. Uraian 2. Jumlah ekuitas tahun pelaporan dan tahun sebelumnya	Format Laporan Perubahan Ekuitas SKPD harus menggambarkan: 1. Uraian 2. Jumlah ekuitas tahun pelaporan dan tahun sebelumnya	Sesuai
Penyajian informasi mengenai Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO pada periode Bersangkutan, Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi Ekuitas, dan Ekuitas Akhir	Laporan Perubahan Eukitas menyajikan informasi mengenai: 1. Ekuitas Awal 2. Surplus/Defiisit-LO 3. Kewajiban untuk Dikonsolidasikan 4. Ekuitas Akhir	Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai Ekuitas Awal Surplus/Defisit-LO pada Periode Bersangkutan, Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi Ekuitas, dan Ekuitas Akhir	Sesuai
Pengungkapan dalam CaLK	Catatan atas Laporan Keuangan untuk Laporan Perubahan Ekuitas mengungkapkan: 1. Perbandingan dengan periode yang lalu 2. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode lalu 3. Rincian yang diperlukan	Catatan atas Laporan Keuangan untuk Laporan Perubahan Ekuitas mengungkapkan: 1. Perbandingan dengan periode yang lalu 2. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode lalu 3. Rincian yang diperlukan	Sesuai

Sumber: Data olahan, 2024

Berdasarkan tabel 4, BPKPD Kota Tomohon telah menyajikan dan mengungkapkan setiap rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang dimana hal tersebut telah sejalan dengan penelitian Arinda (2023) dan Rahmasari et al. (2023).

Evaluasi penyajian dan pengungkapan Catatan atas Laporan Keuangan Badan

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon

Secara umum, rincian setiap Laporan Keuangan terkait LRA, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas telah termuat di dalam CaLK. Berikut ini, akan dievaluasi CaLK khusus non keuangan berdasarkan SAP dalam Peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan komponen berikut ini:

Tabel 5. Evaluasi Catatan atas Laporan Keuangan

Unsur	BPKPD	PP No 71 Tahun 2010	Ket
Penyajian informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi	Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi mengenai domisili dan bentuk hukum, sifat operasi entitas, kegiatan pokok dan ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya	Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan gambaran entitas secara umum yang meliputi domisili dan bentuk hukum suatu entitas tersebut, kegiatan pokoknya, dan ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar kegiatan operasionalnya	Sesuai
Penyajian Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro	Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi mengenai kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target APBD	Catatan atas laporan Keuangan harus mengungkapkan kebijakan dalam meningkatkan pendapatan, efisiensi dan penentuan penggunaan pembiayaan. Ekonomi makro yang harus diungkapkan adalah asumsi-asumsi indikator yang digunakan dalam penyusunan APBD	Sesuai
Penyajian Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan selama Tahun Pelaporan	Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi mengenai ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD	Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan perubahan anggaran, hambatan dan kendala dalam pencapaian target	Sesuai
Penyajian Rincian dan Penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka keuangan	Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi mengenai rincian informasi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas	Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan rincian dan penjelasan masing-masing pos dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas	Sesuai

Sumber: Data olahan, 2024

Berdasarkan tabel 5, BPKPD Kota Tomohon telah menyajikan dan mengungkapkan setiap rincian pos pada CaLK sesuai dengan SAP yang dimana hal tersebut telah sejalan dengan penelitian Sahrullah et al. (2022) dan Kapantow et al. (2023)

5. Kesimpulan

Penyajian Laporan Keuangan terkait Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan

Ekuitas dan CaLK Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon sebagai satu SKPD telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pengungkapan Laporan Keuangan terkait Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota

Tomohon belum sepenuhnya mengungkapkan rincian pos terkait Neraca dalam CaLK yang berarti belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Daftar pustaka

- Ahmad, A., & Sulaiman. (2023). Analisis penerapan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan pada Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende. *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang*, 10(1), 68-85. <https://e-journal.unmuhkupang.ac.id/index.php/ja/article/view/1108>
- Arinda, & Mahmuda, D. (2023). Evaluasi penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada Pemerintah Kota Baubau. *ENTRIES: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 5(1), 129-145. <http://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/entries/article/view/3992>
- Bafagehi, S., Ilat, V., & Afandi, D. (2023). Analisis penyajian laporan realisasi anggaran berdasarkan standar akuntansi pemerintah pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara: Analysis of presentation of the budget realization report based on government accounting standards at the Office of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of the Sula Islands Regency, North Maluku. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 7(2), 71-80. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/view/49358>
- Bahri, S. (2020). *Pengantar akuntansi berdasarkan SAK ETAP dan IFRS*. Andi
- Irooth, F. R., Elim, I., & Gerungai, N. Y. (2023). Analysis of the application of fixed assets accounting in the preparation of the balance sheet at the North Sulawesi Provincial Office of Cooperatives and SMES. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 2(2), 415-428. <https://journal.formosapublisher.org/index.php/fjmr/article/view/3099>
- Kapantow, E. S. K., Karamoy, H., & Kapojos, P. M. (2023). Penerapan pertanggungjawaban catatan atas laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 04 pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(02), 494-505. <https://doi.org/10.35794/emba.v11i02.48676>
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2020). *Intermediate accounting: IFRS edition*. John Wiley & Sons
- Larasati, E. L. E., Saerang, D., & Datu, C. (2023). Analisis perlakuan akuntansi belanja operaslai pada laporan realisasi anggaran di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(2), 1185-1192. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/45741>
- Mahmudi. (2021). *Akuntansi sektor publik*. UII Press
- Rahmasari, N., Suryana, A. K. H., & Triatmaja, N. A. (2023). Penerapan penyajian laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali. *EKOBIS: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 11(2), 222-234. <https://doi.org/10.36596/ekobis.v11i2.1088>
- Sahrullah, S. A., Saerang, D., & Affandi, D. (2022). Evaluasi pengakuan,

pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan pada Pengadilan Militer III-17 Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(1), 679-688. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lppmekosobudkum/article/view/43552>

Subekti, F., Harjanti, R. S., & Aryanto, A. (2024). Analisis penyajian laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B. *Jurnal Buana Akuntansi*, 9(1), 14-25.

<https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/6140>

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R dan D*. Alfabeta

Suliadi, D., Mas'ud, M., & Sylvia. (2024). Pengaruh sistem akuntansi pemerintahan, penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. *Gendhera Buana Jurnal (GBJ)*, 2(1), 01-14. <https://ejournal.nobel.ac.id/index.php/gbj/article/view/4251>

Tjanrakirana, R. D. P., Ermadiani., & Budiman, A. I. (2021). *Pengantar akuntansi I*. CV. Amanah.